

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang disingkat Babel adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau kecil yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang beribukotakan Pangkalpinang. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal dengan pantainya yang indah, kerukunan antar etnis dan dikenal dengan penghasilan timahnya. Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka dan Selat Gaspar memisahkan antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan bagian dari Sumatera Selatan, namun pada tahun 2000 menjadi provinsi sendiri. Pembentukan didasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari:

1. Kabupaten Bangka
2. Kabupaten Belitung
3. Kota Pangkalpinang

Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001 setelah dilantiknya Pj. Gubernur yakni H. Amur Muchasim, SH yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 pada tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan menambahkan empat Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Bangka Barat
2. Kabupaten Bangka tengah
3. Kabupaten Bangka Selatan
4. Kabupaten Belitung Timur



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016

Gambar 4.1
Peta kepulauan Bangka Belitung

Saat ini, sekitar 1,37 juta warga tinggal di Pulau Bangka Belitung dan 50an pulau lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2015, lapangan usaha pertanian menyerap 37% dari 665 ribu angkatan kerja. Akan tetapi tingkat pengangguran naik 1,15 poin menjadi 6,29%. Meskipun demikian, pencapaian pembangunan manusia tumbuh

1,13% naik menjadi 69,05%. Presentasi penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 tercatat sebagai yang terendah se Indonesia. Sekitar 44% penduduk di Negeri Laskar Pelangi ini termasuk dalam golongan pengeluaran satu juta ke atas per bulan.

B. Wilayah Administratif

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 Kabupaten dan 1 Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003. Dalam wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per-kabupaten pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 15 kelurahan dan 62 desa.
2. Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa.
3. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa.
4. Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa.
5. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa.
6. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa.
7. Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

C. Konsentrasi Pembangunan

Konsentrasi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Adapun konsentrasi pembangunan menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bangka dengan Ibukota Sungailiat berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, pertambangan dan perkebunan.
2. Kabupaten Belitung dengan Ibukota Tanjungpandan berkonsentrasi pada wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, industri pengolahan, dan perikanan laut.
3. Kabupaten Bangka Barat dengan Ibukota Muntok, berkonsentrasi pada pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan dan industri pengolahan.
4. Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibukota di Koba, berkonsentrasi pada perkebunan dan pertambangan.
5. Kabupaten Bangka Selatan dengan Ibukota Toboali, berkonsentrasi pada pengembangan di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan laut dan perdagangan.
6. Kabupaten Belitung Timur dengan Ibukota Manggar, merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian, pariwisata, jasa.

7. Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi merupakan wilayah yang berkonsentrasi pada pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

D. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia pada dasarnya adalah proses perbaikan generasi agar generasi sekarang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Proses perbaikan ini terindikasi dengan pencapaian kehidupan manusia yang mencakup dimensi umur panjang dengan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Maka setiap provinsi wajib mencantumkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sasaran pembangunan.

Tabel 4.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangka	66,41	67,37	67,99	69,34	69,79	70,03
Belitung	66,79	67,17	67,87	69,27	69,56	70,29
Bangka barat	63,16	64,00	64,92	65,85	66,43	67,23
Bangka tengah	65,10	66,09	66,88	67,67	68,09	68,66
Bangka selatan	59,98	60,53	61,17	62,96	63,54	63,89
Belitung timur	64,99	65,86	66,59	67,71	68,10	68,83
Kota pangkalpinang	74,68	75,02	75,69	76,14	76,28	76,61

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2010 – 2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup signifikan. Secara umum, kualitas

pembangunan manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang yaitu 76,61% dan diikuti oleh Kabupaten Belitung adalah 70,29% dan Kabupaten Bangka adalah 70,03%. Sebaliknya pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bangka selatan selama beberapa tahun selalu berada di peringkat akhir dan pada tahun 2015 yaitu 63,89%, itu artinya pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Selatan masih tertinggal diantara Kabupaten lainnya. Dengan metode baru, untuk pencapaian pembangunan manusia di seluruh Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mencapai 69,5% naik 1,13% dari tahun sebelumnya dan termasuk dikategorikan “menengah sedang”.

2. Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan terindikasi berdasarkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dasar. Dalam pembagian “kue pembangunan” penduduk miskin mendapat paling sedikit, paling rendah dan paling akhir sehingga mereka kehilangan orientasi hidup. Tanpa intervensi, keluarga miskin akan melahirkan anggota yang baru yang tingkat pendidikan dan kesehatannya rendah. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dicatat sebagai tujuan pertama dalam pembangunan berkelanjutan.

Tingginya garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kemampuan belanja masyarakat kelas bawah. Artinya, ketimpangan antar penduduk miskin dengan penduduk kaya masih kecil. Terbukti bahwa gini rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 tercatat sebagai yang terendah se Indonesia. Gini rasio yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan turun dari 0,283 pada maret 2015 menjadi 0,275 pada september 2015. Garis kemiskinan september 2015 naik 12,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun garis kemiskinan naik, presentase penduduk miskin pada periode ini turun ke titik terendah.

Tabel 4.4

Jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2015

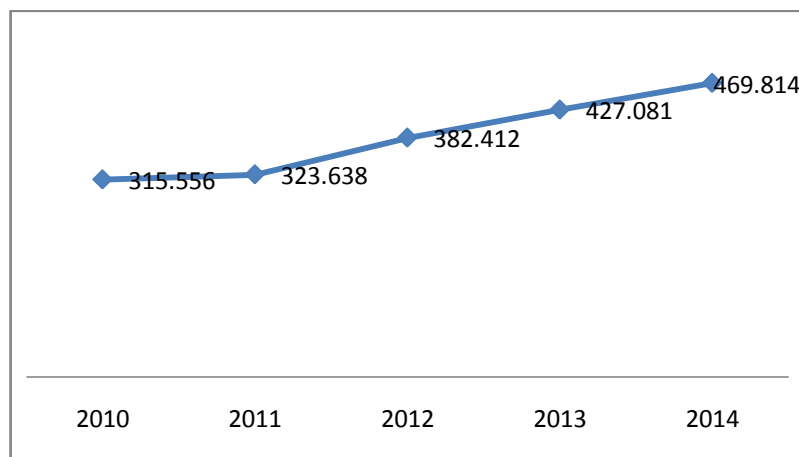
Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangka	21,700	15,410	16,480	16,200	16,00	17,500
Belitung	15,900	11,290	12,090	14,300	12,700	13,200
Bangka barat	9,200	6,530	6,930	6,200	6,100	6,900
Bangka tengah	13,100	9,300	9,950	9,500	9,400	10,200
Bangka selatan	10,700	7,600	8,130	7,500	7,400	8,400
Belitung timur	11,100	7,880	8,460	7,900	7,900	8,700
Kota pangkalpinang	10,600	7,530	8,030	7,800	7,800	9,200

Sumber: Indikator Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015

Dilihat dari Tabel 4.4 jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 – 2015 yang paling dominan tinggi adalah Kabupaten Bangka dengan angka penduduk miskin pada tahun 2010 adaah 21,700 ribu dan yang paling rendah adalah Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk miskin

9,200 ribu pada tahun 2010. Pada tahun 2012 untuk semua Kabupaten/Kota di Bangka Belitung jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Bangka sebesar 17,500 ribu dan paling rendah di Kabupaten Bangka Barat sebesar 6,900 ribu.

Dalam analisis kemiskinan dikenal dengan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan, indikator yang paling sering digunakan adalah Garis Kemiskinan. Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

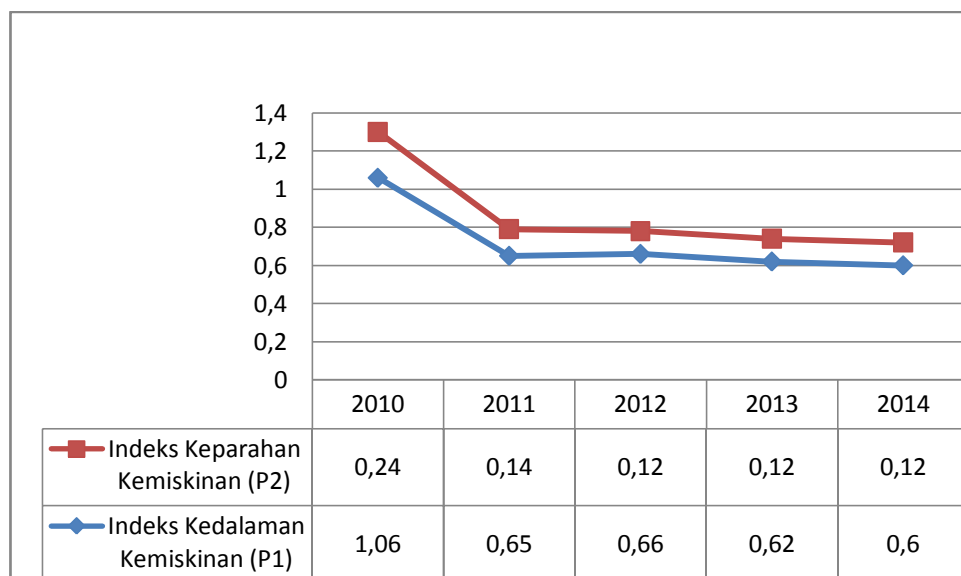


Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Gambar 4.5
Garis kemiskinan tahun 2010-2014

Garis kemiskinan digunakan untuk mengelompokkan penduduk yang miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-bulan di bawah garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) menjelaskan bahwa rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung naik mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan, sedangkan penurunan P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.



Sumber: Indikator Kesejahteraan rakyat provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015

Gambar 4.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) tahun 2010-2014

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dinyatakan oleh P_1 dan P_2 menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik selama periode 2010-2014. Pada tahun 2010 P_1 1,06 persen turun menjadi 0,60 di tahun 2014. Begitu juga dengan P_2 di tahun 2010 0,24 persen turun menjadi 0,12

di tahun 2014. Kedua kondisi ini mengindikasikan bahwa insiden kemiskinan pada tahun 2010-2014 membaik.

3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Secara umum kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi tidak hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi juga terhadap perekonomian nasional dan sebagian provinsi lainnya. Belum pulihnya kondisi perekonomian global turut mempengaruhi lambatnya perekonomian nasional dan regional karena menyebabkan pemerintah turun sehingga ekonomi tersendat dan beberapa harga komoditas seperti timah, karet, dan kelapa sawit yang merupakan bagian dari produk lokal juga masih belum membaik.

Tabel 4.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010-2015

Kabupaten/kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangka	6.551.040	7.553.916	8.321.697	9.127.656	10.119.431	10.948.659
Belitung	4.143.547	4.719.456	5.333.908	5.999.916	6.734.197	7.345.931
Bangka Barat	6.816.096	7.639.801	8.524.963	9.520.980	10.566.785	11.468.481
Bangka Tengah	4.502.396	5.083.212	5.692.455	6.245.090	6.722.319	7.056.091
Bangka Selatan	4.169.513	4.741.368	5.276.994	5.820.036	6.429.776	6.935.461
Belitung Timur	3.579.809	4.024.044	4.541.256	5.079.642	5.643.930	6.112.546
Pangkalpinang	5.799.503	6.595.013	7.462.070	8.414.417	9.358.605	10.214.674

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari tabel 4.8 pada tahun 2010 PDRB paling tinggi di Bangka Barat sebesar 6.816.096 juta dan paling rendah di Belitung Timur sebesar 3.579.809 juta. Di tahun 2015 PDRB atas dasar harga berlaku di Bangka Barat meningkat menjadi 11.468.481 juta sedangkan untuk Ibu Kota Pangkalpinang sebesar 10.214.674 juta. Dari semua pendapatan PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar produk tersebut tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk di ekspor. Oleh karena itu, pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup kuat.

4. Perkembangan Belanja Modal

Belanja modal adalah bentuk pengeluaran yang dikatakan pengeluaran rutin untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada, yang memberi manfaat lebih dari periode satu ke periode lainnya. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan dan menambah nilai aset/modal. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat maka akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4.8
Belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2015

Kabupaten/ Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangka	96 777	79 758	155 292	162 201	161 294	237 322
	435589	392 963	495 030	126 134	472 683	849 623
Belitung	327 809	131 048	183 237	209 996	151 570	247 314
	061 402	999 843	830 812	464 240	498 436	185 946
Bangka barat	124 109	127 526	190 334	167 900	175 587	190 334
	639 596	710 935	420 261	913 817	628 598	420 261
Bangka tengah	96 777	113 137	173 116	154 339	164 353	101 857
	435586	719 735	092 027	962 766	582 283	391 400
Bangka slatan	103 159	87 025	146 974	178 788	196 120	205 755
	446 241	087 703	965 884	262 303	864 404	983 659
Belitung timur	147 568	119 102	172 458	177 481	168 785	205 955
	151 865	200 012	391 709	185 192	911 902	371 976
Pangkalpinang	93 132	102 159	134 837	159 001	170 446	196 105
	058392	212 341	432 134	417 847	721 009	837 101

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2016

Perkembangan belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2010 dan 2011 belanja modal paling tinggi di Belitung sebesar 327.809.061.402 dan 131.048.999.843 sedangkan di tahun 2012 belanja modal paling tinggi di Bangka Barat sebesar 190.334.420.261, tahun 2013 di Belitung sebesar 209.996.464.240, tahun 2014 di Bangka Selatan sebesar 196.120.864.404 dan tahun 2015 yang paling tinggi di Belitung 247.314.185.946 dan paling rendah di Bangka Tengah sebesar 101.857.391.400. Dilihat dari tabel diatas, dari tahun 2010-2015 yang paling banyak pengeluaran belanja modal yaitu di Kabupaten Belitung.